Bersatu: Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika
Vol. 2 No. 4 Juli 2024
e-ISSN :2988-0440 dan p-ISSN :2988-0491, Hal 13-22
DOI: https://doi.org/10.51903/bersatu.v2i4.526

Systematic Literatur Review (SLR): Nilai Spiritualitas dalam Pancasila dalam Kajian Teoritis

Citra Syahrani[1], Dr. Usono, MA.[2]

[1-2]Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Alamat: Jl. Lap. Golf No. 120, Kp. Tengah, Kec. Pancur Batu,
Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara 20353

Korespondensi penulis: : citra0801232256@uinsu.ac.id[1]

Abstract. *The Indonesian society, which is highly diverse in terms of tribe, religion, race, and class, necessitates the establishment of a unifying bond that is acceptable to all communities. Pancasila, an ideology that is embraced by all and encompasses spiritual values, serves as this unifying force. The term "spiritual" denotes something that is connected to the spiritual realm, resonating within the depths of the human heart as a divine gift. This discourse will delve into the theoretical exploration of the spiritual values enshrined in Pancasila, namely the values of the divine, humanity, unity, consultation, and justice. These values form the bedrock of the Indonesian Nation's existence and are in congruence with the universal values upheld by all religions. They permeate all facets of life, including politics, welfare, culture, and nationality. Pancasila acts as a source of inspiration, galvanizing all Indonesians to actualize their nation's aspirations for independence. The essence of the spiritual values embodied in Pancasila serves as an accurate reflection of the Indonesian people's intrinsic nature. Ultimately, spirituality can serve as a conduit for achieving the integrity and cohesion of the diverse Indonesian nation.*

Keywords: *Values; Spirituality; Pancasila.*

Abstrak. *Indonesia memiliki masyarakat yang sangat beragam, ditandai dengan variasi suku, agama, ras, dan kelas, yang mengharuskan pembentukan ikatan yang dapat diterima secara universal. Pancasila, ideologi yang mencakup semua, secara efektif memenuhi persyaratan ini sambil mewujudkan nilai-nilai spiritual. Istilah "spiritual" menunjukkan sesuatu yang bersifat spiritual atau terkait dengan alam spiritual, yang berada di dalam hati manusia dan dianugerahkan oleh entitas ilahi. Wacana ini akan menjelaskan tentang pemeriksaan teoritis nilai-nilai spiritual yang dimanifestasikan di Pancasila, yaitu nilai-nilai ilahi, kemanusiaan, persatuan, konsultasi, dan keadilan. Nilai-nilai ini berfungsi sebagai fondasi keberadaan Bangsa Indonesia dan selaras secara harmonis dengan nilai-nilai universal yang dianut oleh semua agama. Mereka menembus semua aspek kehidupan, termasuk politik, kesejahteraan, budaya, kebangsaan, dan seterusnya. Pancasila memenuhi peran sebagai kekuatan inspiratif, memotivasi semua orang Indonesia untuk mewujudkan aspirasi kemerdekaan bangsanya. Esensi fundamental nilai-nilai spiritual yang diabadikan di Pancasila secara akurat mewakili karakteristik intrinsik masyarakat Indonesia. Pada akhirnya, spiritualitas dapat berfungsi sebagai saluran untuk mewujudkan keseluruhan dan kohesi bangsa Indonesia yang pluralistik.*

Kata kunci: *Nilai; Spiritualitas; Pancasila.*

Received: April 19, 2024; Accepted: Mei 12, 2024; Published: Juni 29, 2024
Citra Syahrani[1]: citra0801232256@uinsu.ac.id

PENDAHULUAN

Nilai-nilai Pancasila berasal dari prinsip-prinsip mendalam yang telah ada sejak awal kemerdekaan Indonesia dan telah menembus setiap aspek kehidupan rakyat Indonesia. Prinsip- prinsip dasar Pancasila diambil dari tanah Indonesia oleh para pendiri bangsa, yang telah bertahan hingga puncak kepulauan. Karena sifat konstitutifnya dalam bidang material, formal, dan fungsional, Pancasila dianut oleh beragam kelompok agama dan sosiologis di Indonesia. Akibatnya, Pancasila berfungsi sebagai fondasi yang memaksa setiap warga negara untuk mematuhi prinsip-prinsip inti yang ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan.

Sementara pembentukan etika negara-bangsa berdasarkan kesalehan sosial yang berasal dari agama membutuhkan penggabungan agama ke dalam Pancasila, agama itu sendiri juga mengharuskan integrasi Pancasila dengan nilai-nilai universal seperti keadilan, kemanusiaan, persatuan, dan kemanusiaan. Di era globalisasi saat ini, prinsip-prinsip Pancasila terbukti dalam tindakan dan perilaku warga. Kemajuan teknologi yang disaksikan selama era globalisasi ini juga berpotensi melemahkan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat. Jika prinsip-prinsip Pancasila berhenti diterapkan dalam masyarakat, maka akan menimbulkan konsekuensi yang merugikan bagi negara Indonesia, termasuk eskalasi dalam kasus-kasus penistaan agama dan kejahatan yang dilakukan atas nama agama, seperti terorisme.

Banyak orang percaya bahwa Pancasila adalah ideologi dengan tujuan mengubah Indonesia menjadi bangsa Islam. Sikap ini berakar pada survei yang dilakukan oleh Pusat Studi Pancasila UGM dan Kajian Presiden Indonesia (IPS) tentang Pandangan Publik terhadap Pancasila. Sejumlah besar individu mempertahankan keyakinan bahwa Pancasila adalah ideologi yang memfasilitasi transisi Indonesia menjadi negara yang berorientasi agama.

Menurut Haedar Nasir, Ketua Umum Pusat Muhammadiyah (2021), agama berfungsi sebagai fondasi spiritualitas agama, Pancasila berfungsi sebagai fondasi spiritualitas ideologis, dan budaya berfungsi sebagai fondasi spiritualitas sosial. Oleh karena itu, sangat penting bagi mereka yang berada di posisi kekuasaan di negara ini dan penduduknya untuk memprioritaskan sumber-sumber ini. Akibatnya, Indonesia akan membangun landasan spiritual yang kuat. Variasi yang berbeda dan konflik yang masuk

akal ada dalam ranah nasional dan internasional. Seperti yang ditegaskan Haedar Nasir (2021), spiritualitas berfungsi sebagai katalis untuk mencegah kemerosotan negara dan bangsa. Pernyataan yang dibuat oleh perwakilan lembaga keagamaan terbesar kedua di Indonesia telah memotivasi masyarakat Indonesia untuk mengeksplorasi prinsip-prinsip spiritual Pancasila dengan pola pikir emansipatif. Upaya ini telah menjadi upaya penelitian yang menarik dan strategis, yang bertujuan untuk merekonstruksi kohesi kehidupan masyarakat.

KAJIAN TEORITIS

Tidak seperti banyak negara lain di seluruh dunia, Indonesia memiliki latar belakang sejarah yang kaya dan ideologi yang secara signifikan mempengaruhi urusan domestik dan internasionalnya. Pancasila, prinsip dasar bangsa, diangkat ke status ideologi bangsa Indonesia karena nilai-nilainya berakar kuat pada esensi rakyat Indonesia. Nilai-nilai ini, yang berasal dari prinsip-prinsip agung yang telah ada sejak lama, telah meresap ke seluruh aspek masyarakat Indonesia, bahkan sebelum pencapaian kemerdekaan negara. Para pendiri bangsa, pada masa puncak kemakmuran Nusantara, menggali Pancasila sebagai landasan masyarakat Indonesia. Dalam eksplorasi prinsip-prinsip dasar Pancasila, para pendiri bangsa tidak hanya memahami ide-ide ini secara intelektual, tetapi juga secara empatik mengalami dan mengingat penderitaan yang dialami oleh rekan senegaranya selama penjajahan, perjuangan, dan kerinduan akan kebebasan, persatuan, dan identitas kolektif (Latif, 2015). Saat ini, ada indikasi yang menggembirakan upaya revitalisasi Pancasila. Semangat untuk meremajakan Pancasila memang patut dipuji. Banyak pertemuan ilmiah dan forum publik telah diselenggarakan di berbagai lokasi, mendorong wacana ilmiah di antara akademisi dan masyarakat umum.

Penerimaan ideologi Pancasila sebagai kekuatan pemersatu dapat dikaitkan dengan kehadiran beragam suku, agama, ras, dan kelompok dalam masyarakat Indonesia yang luas. Soekarno sendiri memandang Pancasila sebagai sarana untuk menumbuhkan persatuan di antara rakyat dalam perjuangan mereka melawan imperialisme, sejauh menggambarkannya sebagai Weltanschauung. Dari perspektif sosiologis, masyarakat Indonesia yang beragam secara agama memanfaatkan Pancasila karena nilai-nilainya merupakan realitas nyata, formal, dan fungsional. Akibatnya, Pancasila berfungsi sebagai

fondasi yang mewajibkan setiap warga negara untuk mematuhi nilai-nilai instrumental dalam bentuk aturan dan peraturan yang ditetapkan secara hukum. Menurut Saidi (2009), penggabungan agama sangat penting bagi Pancasila untuk melahirkan negara-bangsa yang etis berdasarkan kesalehan sosial yang berasal dari ajaran agama. Sebaliknya, agama menuntut Pancasila untuk merangkul nilai-nilai universal yang ditemukan dalam ajaran agama, seperti keadilan, kemanusiaan, persatuan, multiplisitas, dan lain-lain. Pancasila mencakup nilai- nilai spiritual yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, dengan tujuan mewujudkan nilai-nilai ini dalam kenyataan. Misalnya, Pancasila Sila Ketuhanan mencakup spiritualitas agama, yang sangat penting untuk kelangsungan hidup dan integritas negara-bangsa (Latif, 2015). Penghormatan kepada Yang Mahakuasa, yang menegakkan kemerdekaan dan kesalehan, sangat penting untuk mempromosikan pluralitas di Indonesia. Menunjukkan pengabdian kepada Tuhan melibatkan menghormati kebebasan individu untuk memilih keyakinan mereka sendiri. Dalam ayat ketiga Pembukaan UUD 1945, rumus Pancasila menegaskan semangat mengakui belas kasihan Yang Mahakuasa. Pancasila mencakup nilai-nilai spiritual yang membebaskan yang berfungsi sebagai inti dari keberadaan bangsa, dan dianggap sebagai ideologi yang membentuk keyakinan ideologis, konstitusi, dan spiritualitas.

"Spiritual" menunjukkan sesuatu yang bersifat spiritual atau yang berkaitan dengan alam spiritual, yang berada di dalam hati manusia sebagai anugerah ilahi. Pancasila mencakup prinsip-prinsip moral yang tak terpisahkan, menembus semua aspek kehidupan, termasuk politik, kesejahteraan, budaya, dan kebangsaan, antara lain. Nilai intrinsik dari ajaran ilahi berfungsi untuk mewujudkan esensi spiritual bangsa, menandakan Indonesia sebagai negara taat yang dijiwai dengan banyak nilai spiritual, menjaga solidaritas, kebebasan beragama, kepercayaan, dan penghormatan terhadap martabat manusia (Wahono, 2021). Spiritualitas dan hukum terkait erat, karena tidak adanya agama dalam masalah hukum akan membuat hukum menjadi legalisme mekanis belaka, sementara tidak adanya hukum dalam masalah agama akan mengurangi fungsi sosialnya. Memang, Indonesia memiliki kecakapan luar biasa dalam memberlakukan undang-undang yang mewujudkan unsur-unsur agama, yang telah lama berakar dalam struktur masyarakat.

Di era globalisasi kontemporer, prinsip-prinsip Pancasila telah hangus dalam tindakan semua warga negara. Di era globalisasi saat ini, kemajuan teknologi dapat

menghembuskan kehidupan ke dalam nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat. Berkurangnya nilai-nilai Pancasila di ruang publik telah berdampak besar pada masyarakat Indonesia, termasuk contoh-contoh penghujatan dan pelanggaran yang dilakukan dengan kedok agama, seperti terorisme. Terorisme berdiri sebagai salah satu hasil yang dihasilkan dari pembusukan prinsip-prinsip dasar Pancasila. Terorisme berfungsi sebagai salah satu akibat dari erosi prinsip etika Pancasila. Menurut Junaid (2013), terorisme didefinisikan sebagai perspektif yang menyatakan bahwa penggunaan metode kekerasan, ancaman, atau tindakan sebanding yang mampu menanamkan kecemasan dan kepanikan, yang menyebabkan korban dan kerusakan properti, digunakan untuk mencapai tujuan, baik secara individu maupun kolektif, dalam konteks nasional dan internasional. Berdasarkan pemahaman Junaid tentang terorisme, jelas bahwa terorisme tidak dapat diabaikan. Jika nilai-nilai spiritual yang tercakup dalam Pancasila tidak diimplementasikan dalam kehidupan rakyat dan negara, maka bangsa Indonesia akan jatuh ke dalam keadaan kekacauan total. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila harus segera diintegrasikan kembali di antara semua orang Indonesia, khususnya generasi muda yang menjadi penerus dan pilar bangsa Indonesia.

Diskusi selanjutnya akan menyelidiki aspek teoritis dari nilai-nilai spiritual yang dirangkum dalam prinsip-prinsip Pancasila, yaitu nilai-nilai Keilahian, Kemanusiaan, Kesatuan, Konsultasi, dan Keadilan. Nilai-nilai ini berfungsi sebagai landasan keberadaan Bangsa Indonesia dan selaras dengan nilai-nilai universal yang dianut oleh semua agama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai Ketuhanan

Agama, sebagai kejadian yang mencakup segalanya, telah bertahan sejak awal kemanusiaan. Kehadiran keyakinan agama telah bertahan sejak awal keberadaan manusia. Dalam bukunya tentang Aspek Sejarah Agama, Allan Menzies secara komprehensif menjelaskan kronik ekstensif tentang kemunculan dan perkembangan agama, yang mencakup wilayah timur dan barat (Nur, 2020).

Sejak lama, Indonesia percaya pada hal-hal metafisik atau supranatural. Sistem kepercayaan yang didasarkan pada animisme telah ada sejak zaman nenek moyang

Indonesia. Menurut Samho dan Setiawan (2015), konsep Ketuhanan yang unik dibentuk oleh pengaruh kepercayaan tradisional dan agama-agama lokal seperti Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen. Dari sinilah spirit ketuhanan bermula dan masyarakat Indonesia terus menganut agama yang diakui secara hukum.

Berdasarkan penggambaran singkat yang disebutkan di atas dan didasarkan pada prinsip- prinsip inti yang menumbuhkan kesalehan dan spiritualitas di Indonesia, praktik merangkul iman kepada Tuhan dan pengabdian agama di Indonesia pasti akan mewujudkan keyakinan bahwa Tuhan, sebagai Makhluk Maha Tinggi, menganugerahkan nilai-nilai kemanusiaan yang memberdayakan individu untuk memilih jalan hidup mereka sendiri. Sesuai dengan keyakinan ini, setiap penganut agama di Indonesia harus memiliki kapasitas dan kecenderungan untuk menghormati otonomi agama semua individu, secara aktif terlibat dalam advokasi kebebasan beragama, dan menunjukkan kesabaran terhadap kebebasan beribadah. Pengakuan bahwa Tuhan memberikan otonomi kepada umat manusia secara fundamental mendukung prinsip ini (Samho dan Setiawan, 2015).

Dengan struktur piramidal dan hierarkis, Pancasila menunjukkan bahwa sila pertama Tuhan Yang Maha Esa meliputi dan menjiwai sila-sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia (Kaelan, 1996). Ini menunjukkan bahwa ruh ketuhanan ada di setiap sila Pancasila, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya memiliki nilai- nilai spiritual.

Nilai Kemanusiaan

Dengan struktur piramidal dan hierarkisnya, Pancasila menunjukkan bahwa prinsip-prinsip awal ilahi mencakup dan menghidupkan prinsip-prinsip keadilan dan masyarakat yang beradab, kesatuan rakyat Indonesia, masyarakat yang dipandu oleh kebijaksanaan dalam musyawarah dan representasi, dan kesetaraan sosial bagi semua individu yang tinggal di Indonesia (Kaelan, 1996). Ini menandakan bahwa esensi keilahian menembus setiap prinsip Pancasila, dan nilai-nilai inheren yang terkandung di dalamnya memiliki signifikansi spiritual.

Istilah “kemanusiaan” dalam prinsip kedua Pancasila berasal dari etimologi kata “manusia” dan afiks “ke-”. Namun demikian, substansi atau esensi dari ajaran ini tetap

konsisten, tidak dapat dipisahkan dari perintah-perintah lainnya. Prinsip-prinsip ilahi membimbing prinsip-prinsip bangsa ini, yang mengakui kesetaraan semua individu. Berdasarkan nilai-nilai dasar prinsip kedua ini, penggambaran ideal manusia di Indonesia melibatkan penyembahan kepada Tuhan dengan memperlakukan orang lain dengan adil dan sopan; mendukung dan menjunjung tinggi integritas bangsa; terlibat aktif dalam pembangunan eksistensi komunal yang menegakkan hak-hak semua individu; dan membina kolaborasi dalam realitas sosial. Gagasan bahwa iman kepada Tuhan harus selaras dengan kemanusiaan terletak di jantung nilai-nilai fundamental ini. Dalam konteks ini, iman humanistik kepada Tuhan, bukan iman sektarian, membangun hubungan positif dengan anggota masyarakat (Samho dan Setiawan, 2015).

Prinsip-prinsip yang berkaitan dengan perlakuan moral dan etika individu memiliki aspek manusia yang berbeda, sehingga meningkatkan kualitas keseluruhan interaksi manusia. Pelaksanaan tindakan kebajikan memang dapat dilakukan dengan cara yang adil dan halus, sehingga memfasilitasi penerapan cita-cita manusia yang paling agung seperti kebajikan dan kecerdasan dalam ranah hubungan interpersonal, baik itu antara manusia atau makhluk hidup lainnya. Perwujudan dari ajaran ini terletak pada emansipasi bangsa-bangsa dari kuk penjajahan, serta pengurangan penderitaan yang disebabkan oleh kemiskinan, bencana alam, kemiskinan, dan degradasi ekologis.

Ajaran ketiga Pancasila, yang berpusat di sekitar nilai inti kemanusiaan, memiliki kemampuan untuk mengatasi transformasi global secara preventif, mencakup perbaikan ketidakadilan dan disparitas baik di dalam negeri maupun internasional, sementara secara bersamaan memperkuat integritas bangsa tanpa mengorbankan keselamatan penduduknya.

Nilai Persatuan

Afinitas terhadap tanah air dan konsep nasionalisme sering dikaitkan dengan kecenderungan ketiga, yaitu Masyarakat Indonesia. Awalnya, Sukarno menyebutnya sebagai “nasional,” yang jelas mengacu pada kewarganegaraan Indonesia. Dalam hal-hal yang berkaitan dengan bangsa, Sukarno merangkul dan memasukkan teori-teori Ernest Renan dan Otto Bauer, meskipun mengakui keterbatasan gagasan kedua ahli teori ini. Soekarno mengambil inspirasi dari gagasan Ernest Renan bahwa bangsa adalah jiwa

tunggal, atau *"une nation est un ame,"* menekankan persatuan bangsa (Samho dan Setiawan, 2015).

Bangsa Indonesia tidak dapat mencapai persatuan semata-mata atas dasar karakteristiknya yang beragam. Seperti yang dinyatakan oleh Hanafi (2018), sementara individu Indonesia memiliki berbagai kualitas inheren yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan, esensi dan esensi ras Indonesia pada dasarnya bersatu dan tidak dapat dipisahkan. Semangat persatuan di antara rakyat Indonesia, tanpa segala bentuk diskriminasi, merupakan satu-satunya jalan untuk mewujudkan aspirasi kemerdekaan Indonesia dan menegakkan prinsip keadilan di antara manusia, yang akan menjadi fondasi pancasila pancasila kelima.

Nilai Permusyawaratan

Pluralisme dalam suku, agama, klan, dan distrik adalah kenyataan yang diakui Soekarno. Dalam mengejar kemerdekaan Indonesia, rencananya dijiwai dengan kesadaran ini. Selain itu, pertemuan dan keterlibatan politiknya dalam mengadvokasi demokrasi juga dipengaruhi oleh kesadaran ini. Soekarno menyadari bahwa perselingkuhan dapat berfungsi sebagai kekuatan sosial atau modal dalam membangun negara yang kuat. Selain itu, efektivitas suatu bangsa juga dipengaruhi oleh pemerintahannya. Dalam konteks khusus ini, Soekarno menyatakan, "Saya sangat yakin bahwa prasyarat mutlak untuk kekuatan Negara Indonesia terletak pada demokrasi, representasi," menandakan aspirasinya yang kuat untuk memerintah negara Indonesia, yaitu bhinneka, dengan cara yang menonjolkan demokrasi atau kedaulatan rakyat (Samho dan Setiawan, 2015).

Ayat keempat Pancasila menetapkan bahwa perumusan pesan secara komprehensif didasarkan pada persatuan melalui jalan kebijaksanaan (Yusdiyanto, 2016). Untuk memastikan bahwa hasil yang dihasilkan tidak membahayakan individu mana pun dan membawa konsekuensi yang adil bagi semua, proses pengambilan keputusan melingkar didasarkan pada kebenaran. Setiap agama di Indonesia menanamkan ajaran tentang kebajikan keilahian, salah satunya termasuk jalan kebijaksanaan dan kejujuran.

Nilai Keadilan

Keadilan mewakili kondisi sosial di mana individu mengalami otonomi, paritas, dan persahabatan di antara mereka sendiri. Konsep keadilan sangat penting bagi semua

konstituen komunitas. Keyakinan moral bahwa keberadaan setiap anggota dalam masyarakat masing-masing harus dicirikan oleh kasih sayang, kesopanan, dan kehormatan merupakan dasar bagi pencarian keadilan. Ulpianus, seorang sarjana terpelajar hukum Romawi kuno, mengemukakan bahwa sejauh mana seseorang berperilaku adil terhadap orang lain dalam komunitas mereka bergantung pada kemampuan mereka untuk mengakui dan menegakkan hak-hak orang lain. Dia memperkenalkan istilah "*Tribuere jus suum cuique*" untuk merangkum gagasan ini. Tujuannya adalah untuk menghormati dan mengakui hak orang lain, sehingga membuat perilaku tersebut adil. Akibatnya, keadilan sosial secara universal menandakan bahwa setiap anggota masyarakat berhak atas keberadaan yang makmur dan berkembang (Samho dan Setiawan, 2015).

Signifikansi spiritual keadilan, sebagaimana dimanifestasikan dalam ajaran kelima, berasal dari esensi kemanusiaan, menandakan kepedulian komunal dan keharmonisan masyarakat. Keadilan berbasis kemanusiaan mencakup kapasitas kolektif untuk meringankan satu sama lain dari kondisi kehidupan yang tidak manusiawi, seperti kemiskinan, dan untuk secara empatik mengambil bagian dalam beban sesama manusia (Tanamal dan Siagian, 2020).

Keadilan dalam kerangka ajaran kelima Pancasila didasarkan pada gagasan keadilan ilahi, menegakkan hak asasi manusia, menjaga nilai persatuan dan solidaritas, menganut prinsip konsensus melalui musyawarah, dan menjamin keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia, seperti yang dikemukakan oleh Febriansyah (2017).

KESIMPULAN DAN SARAN

Prinsip-prinsip pertama Pancasila membentuk dasar bagi hukum-hukum yang tersisa, dan setiap nilai yang tercakup di dalamnya merupakan esensinya. Akibatnya, nilai-nilai spiritual meresap ke dalam setiap komponen Pancasila. Nilai-nilai ini, yang diberikan kepada umat manusia oleh Tuhan, memanifestasikan dirinya dalam semua aspek keberadaan. Terdiri dari lima pilar yang saling terkait, Pancasila berkembang menjadi entitas yang terpadu. Inti dari nilai-nilai spiritual yang diabadikan di Pancasila melambangkan karakter manusia Indonesia. Dengan demikian, adalah kewajiban setiap individu di Indonesia untuk mematuhi nilai-nilai spiritual yang diabadikan di Pancasila. Pancasila berfungsi sebagai sumber inspirasi untuk menanamkan tekad di antara semua

orang Indonesia dalam mengejar aspirasi bangsa mereka untuk kemerdekaan. Pada akhirnya, spiritualitas berkontribusi pada keseluruhan dan solidaritas masyarakat Indonesia yang beragam.

DAFTAR REFERENSI

Latif, Yudi. 2015. Negara Paripurna Historitas, Rasionalitas dan Aktualitas. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

Wahono, Francis. Revitalisasi dan Rekonstruksi kelahiran Pancasila 1 Juni dalam Menjawab Kompleksitas Permasalahan Bangsa Indonesia.Jurnal Pembumian Pancasila Vol. I Nomor 1. 2021.

Febriansyah, F. I. (2017). Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa. DiH Jurnal Ilmu Hukum, 13(25), 1-27.

Tanamal, Nini Adelina, and Sapta Baralaska Utama Siagian. 2020. "Implementasi Nilai Pancasila Dalam Menangani Intoleransi Di Indonesia." Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia 8(3): 408–25

Samho, Bartolomeus. Setiawan, Rudi. 2015. Mengartikulasikan Pancasila Menjadi Spiritualitas Kehidupan Bangsa Indonesia Yang Majemuk: Sebuah Kajian Filosofis. LPPM Universitas Katolik Parahyangan.

Yusdiyanto, Y. (2016). Makna Filosofis Nilai-Nilai Sila Ke-Empat Pancasila Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia. FIAT JUSTISIA, 10(2).

Hanafi. (2018). Hakikat Persatuan Dalam Konteks Indonesia. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Vol 3, Nomor 1, Hal 1-2.

Kaelan, 1996, filsafat Pancasila disusun berdasarkan GBPP dan SAP Tahun 1995, Paradigma Yogyakarta

'Aeni, Nurm et all., 2020, At-Tarbiyah Sebagai Konsep Pendidikan dalam Islam, INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendiidikan, Agama dan Kebudayaan, Vol.6, No.1.

Wahono, B. Rahman, F. (2021). "Pengaruh Work Life Balance, Lingkungan Kerja Fisik, dan Lingkungan Kerja Non Fisik Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Pada PT. Ciomas Adisatwa". Jurnal Ilmiah Riset Manajemen. 10(3), 49-56.

Junaid, H. (2013). Pergerakan Kelompok Terorisme Dalam Perspektif Barat dan Islam. Sulesana, 8(2) Saidi, A. 2009. Potensi Batubara tidak Produktif (Subbitumminus) sebagai Sumber Bahan Organik Alternatif untuk Meningkatkan Efisiensi Pemupukan P dan Produktifitas Marginal. Laporan

Hibah Strategis Nasional Batch 11. Hal 7-15

Abdul Latief, (2015), "Pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi terhadap produktivitas kerja karyawan pada Afdeling Praen I kebun unit I PT Mopoli Raya kabupaten Langkat", Jurnal Manajemen dan Keuangan, Vol. 4, NO. 1, pp. 296.